

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No.24 Tahun 2005).

Pemerintah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik.¹

Saat ini banyak daerah yang berlomba untuk meningkatkan pembangunan daerahnya sendiri, karena salah satu faktor pendukung kesejahteraan daerah adalah dengan tersedianya infrastruktur yang memadai. Namun faktanya seperti yang dilansir dalam wartaekonomi.co.id, masih banyak Pemerintah Daerah (Pemda) lebih banyak mengalokasikan belanjanya pada sektor-sektor yang kurang

¹Wimpi Priambudi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013," (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 1.

diperlukan dan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin, sebab 100% belanja rata-rata hanya 20% yang digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengadaan aset untuk investasi untuk meningkatkan pelayanan publik.²

Rendahnya penyerapan belanja terutama disebabkan oleh masih minimnya belanja Kementrian Negara/Lembaga terutama pada belanja barang dan belanja modal (Dirtjen Perimbangan Keuangan, 2012).³ Keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi.⁴ Berasal dari dana bantuan (*fund*), pengalokasian sumber-sumber pendapatan daerah yang diperuntukan untuk kepentingan publik, baik alokasi dana untuk belanja langsung maupun tidak langsung,⁵ lemahnya perencanaan penerapan rencana strategis anggaran serta realisasi anggaran pada kurun waktu satu tahun anggaran yang

²Novia Nur Putriasni, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Belanja Pemeliharaan (Studi Pada Pemerintah Kota Cirebon)," (Skripsi pada Universitas Komputer Indonesia), 2.

³Yunistin Ndede, Julli J Sondakh, dan Winston Pontoh, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Manado," Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado 95115 Indonesia, Vol. 16, No.03, (2016), 587.

⁴Wimpi Priambudi, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013," (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 3.

⁵Askam Tuasikal, "Pengaruh DAU, DAK, PAD, Dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia," Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Pada Universitas Pattimura Ambon, Vol. 1, No. 2 (Juli, 2008), 142-155.

telah diputuskan dalam APBD. Perkembangan penyerapan anggaran yang buruk dan timpang.⁶

Melihat adanya kondisi belanja modal dalam APBD di pemerintah provinsi di Indonesia khususnya dalam hal ini yaitu pemerintah daerah Kabupaten Serang kurang diperhatikan, pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBDnya untuk belanja modal dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah.

Peningkatan APBD Kab.Serang nampaknya belum mampu membiayai belanja modal, seperti belum mampu memperbaiki kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Serang, terutama jalan-jalan kabupaten diperbatasan antara Kabupaten Serang dengan kabupaten/kota sekitar. Kondisi jalan di Kabupaten Serang masih 50% yang kondisinya masih ada yang rusak, sebagian besar ruas jalan di Kabupaten Serang dalam kondisi rusak, baik rusak sedang maupun parah. Dari 601 KM ruas jalan di Kabupaten Serang, hanya 121 KM atau 20% persen yang sudah

⁶Anak Agung Ayu Nitya Saridewi, Piers Andreas Noak, Ni Wayan Supriyanti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Kasus: Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar Tahun 2013)," Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

mulus atau mantap. Sisanya sepanjang 480 KM dalam kondisi tidak baik atau belum mantap.

Hal ini bisa dikarenakan karena pihak pelaksanaannya sendiri, pihaknya masih menunggu lelang terlebih dahulu. Hal ini juga disebabkan karena pemerintah daerah dalam membangun jalan tidak memperhatikan aspek kualitas, sehingga hasilnya cepat rusak dan buruk. Masyarakat mengeluhkan terkait kemacetan di sejumlah titik jalan karena jalan rusak dan juga butuh pelebaran. Untuk mempercepat peningkatan kualitas jalan, Pemkab Serang telah menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang percepatan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan perda yang berlaku hingga tahun 2021, diharapkan Pemkab Serang mampu menargetkan peningkatan jalan sepanjang 100KM setiap tahunnya. Akan tetapi, proses percepatan pembangunan infrastruktur ini masih terhambat dengan belum selesainya proses lelang. Karena prosesnya tidak mudah, lelang tidak ada di DPU tapi oleh instansi lain.

Menunjang ketersediaan pengalokasian dana untuk belanja modal dan belanja pemeliharaan, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak

daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur pendapatan asli daerah (PAD). Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya.⁷

Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Pemerintah daerah setiap tahun mengalokasikan belanja modal baik untuk mengganti aset lama maupun pembelian aset baru sehingga aset pemerintah daerah bertambah nilainya dari tahun ke tahun, sehingga dapat dikatakan aset tetap pemerintah daerah yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan *outcome/output* dari terealisasinya belanja modal dalam setiap tahun anggarannya.⁸

Oleh karena penjelasan yang telah penulis jabarkan diatas, penulis mencoba mengetahui apakah variabel penerimaan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal, maka penelitian ini

⁷Yunistin Ndede, Julli J Sondakh, dan Winston Pontoh, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Manado," Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16, No.03, (Tahun 2016), 587.

⁸Novia Nur Putriasni, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Dan Implikasinya Pada Belanja Pemeliharaan (Studi Pada Pemerintah Kota Cirebon)," 1.

penulis beri judul **“Pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten Serang Tahun 2010-2017.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat Pendapatan Asli suatu daerah berpengaruh terhadap tingkat Belanja Modal daerah tersebut. Apabila pengelolaan Pendapatan Asli dalam suatu daerah tidak baik maka akan berdampak pada Belanja Modal suatu daerah yang menyebabkan pemerintah daerah sulit untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan daerah;
2. Anggaran belanja modal yang ada tidak sesuai dengan realisasi belanja modal disebabkan karena banyak faktor, salah satunya yaitu kegagalan lelang tender;
3. Belanja Modal yang tidak terserap setiap tahunnya apakah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya penelitian yang akan dilakukan maka dalam penelitian ini peneliti membatasi variabel-variabel yang menjadi objek penelitian. Untuk variabel dependen adalah Belanja Modal untuk variabel independennya adalah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Data yang digunakan adalah data *time series* dari Triwulan I Tahun 2010 sampai Triwulan III Tahun 2017.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Serang Periode Tahun 2010-2017?
2. Seberapa besar pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Serang Periode Tahun 2010-2017?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Serang Periode Tahun 2010-2017.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Serang Periode Tahun 2010-2017.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pola hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Serta memperoleh kesempatan menerapkan pengetahuan teoritis yang didapat selama di perkuliahan dalam berbagai bidang dunia kerja dan di kehidupan sehari-hari.

2. Bagi Pemerintah

Bagi instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Serang yaitu :

- a. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk lebih dapat meningkatkan penerimaan PAD;
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi efektifitas dan efisiensi penggalan sumber-sumber penerimaan PAD.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi referensi, bahan pembandingan penelitian lain dan memberikan sumbangan pemikiran untuk konsentrasi Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

G. Kerangka Pemikiran

Anggaran Belanja Modal suatu daerah tiap tahunnya akan mengalami peningkatan berhubungan dengan tingkat kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah harus

secara baik agar pendapatan daerah yang diperoleh bisa memenuhi anggaran belanja modal daerah.

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.⁹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu terjadilah ketimpangan PAD. Di satu sisi ada daerah yang sangat kaya dengan perkembangan ekonomi yang baik karena memiliki PAD yang tinggi dan di sisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.

Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal

⁹Deddi Nordiawan, dkk., *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 39.

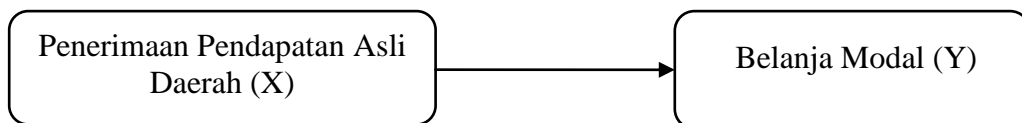
tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.¹⁰

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dari uraian di atas, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa penulis akan melakukan penelitian Pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Alasan penulis memilih variabel Pendapatan Asli Daerah karena variabel tersebut merupakan variabel sektor publik yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

¹⁰Nur Indah Rahmawati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah" (Skripsi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2010), 3.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab pertama yaitu pendahuluan, yang dijadikan acuan dalam proses awal penelitian, di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori

Pada bab kedua menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu menguraikan tentang, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Konsepsi Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam, Hubungan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal, Penelitian Terdahulu, dan Hipotesis Penelitian.

Bab III: Metodologi Penelitian

Pada bab ketiga menjelaskan tentang metodologi penelitian yang didasarkan dan dikembangkan berdasarkan pokok masalah utama guna mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pada bab ini menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian

dan sumber data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, statistik deskriptif, teknik analisis data, operasional variabel dan hipotesis.

Bab IV: Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bab keempat menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan meliputi deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V: Penutup

Pada bab kelima ini berisi kesimpulan dari penelitian berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.